

EVALUASI KESESUAIAN PERENCANAAN DAN REALISASI ANGGARAN SEKTOR LINGKUNGAN DI KOTA MAKASSAR

**Mawar Datul Khalwa^{1*}, Raehanun Nafaretta Fiyorentina², Eva Hany Fanida³,
Revienda Anita Fitrie⁴**

^{1,2,3,4}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

E-mail Correspondence: 25040674289@mhs.unesa.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran sektor lingkungan di Kota Makassar selama periode 2021–2026. Penelitian ini penting dilakukan karena masih terbatas penelitian yang secara khusus mengevaluasi konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dan realisasi anggaran pada sektor lingkungan sebagai dasar peningkatan efektivitas pembangunan berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Data dianalisis menggunakan analisis rasio kesesuaian, analisis varians (variance analysis), serta analisis deskriptif komparatif untuk mengukur tingkat kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dan yang terealisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran sektor lingkungan mengalami peningkatan selama periode penelitian, namun tingkat realisasi justru mengalami penurunan dari 90% menjadi 79%. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran belum diikuti oleh efektivitas pelaksanaan program. Faktor penyebab utama meliputi kelemahan dalam proses perencanaan, perubahan kebijakan, serta kendala teknis pelaksanaan program. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah sebagai dasar penyempurnaan proses penganggaran berbasis kinerja dan memperkaya kajian mengenai evaluasi pengelolaan anggaran sektor lingkungan.

Kata Kunci: Evaluasi anggaran; Kota Makassar; Perencanaan anggaran; Realisasi anggaran; Sektor lingkungan

ABSTRACT

This study aims to evaluate the alignment between planning and budget implementation in the environmental sector in Makassar City during the 2021–2026 period. This study is important because there is still a limited number of studies that specifically evaluate the consistency between regional planning documents and budget execution in the environmental sector as a basis for improving the effectiveness of sustainable development at the local government level. The study uses a descriptive quantitative approach utilizing secondary data in the form of the Regional Budget (APBD), Budget Implementation Documents (DPA), and Budget Execution Reports (LRA). The data were analyzed using a conformity ratio analysis, analysis of variance (ANOVA), and comparative descriptive analysis to measure the level of conformity between the planned and actual budgets. The results indicate that the environmental sector budget increased during the study period; however, the budget execution rate actually decreased from 90% to 79%. These findings indicate that increased budget allocations have not been accompanied by effective program implementation. The main contributing factors include weaknesses in the planning process, policy changes, and technical constraints in program implementation. This study contributes to local governments by providing a basis for improving performance-based budgeting processes and enriches the literature on the evaluation of environmental sector budget management.

Keywords: Budget evaluation; City of Makassar; Budget planning; Budget implementation; Environmental sector

PENDAHULUAN

Pengembangan sektor lingkungan menjadi salah satu elemen krusial dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempertahankan kualitas lingkungan dengan berbagai program, seperti manajemen sampah, pengendalian polusi, dan perlindungan sumber daya alam. Dalam pelaksanaan, usaha tersebut

sangat ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Berdasarkan Status Lingkungan Hidup Indonesia (KLHK, 2024), volume timbunan sampah nasional mencapai lebih dari 56 juta ton per tahun dengan tingkat pengelolaan sekitar 39%. Sementara itu, BPS Kota Makassar (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi meningkatkan tekanan terhadap pengelolaan sampah, kualitas udara, dan ruang terbuka hijau sehingga memerlukan dukungan anggaran yang semakin besar. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menunjukkan bahwa peningkatan kebutuhan pelayanan pengelolaan sampah setiap tahun belum sepenuhnya diimbangi dengan optimalisasi penyerapan anggaran sehingga efektivitas program lingkungan masih menjadi tantangan.

Kota Makassar, salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi beragam masalah lingkungan yang rumit, seperti volume sampah yang meningkat, pencemaran air dan udara, serta berkurangnya kawasan terbuka hijau. Keadaan ini memerlukan pengelolaan anggaran sektor lingkungan yang efektif supaya program-program yang dirancang dapat terealisasi secara optimal dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya sering kali terdapat ketidakcocokan antara perencanaan anggaran dan pelaksanaannya. Hal ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti perencanaan yang tidak optimal, keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan, serta hambatan teknis dalam pelaksanaan program. Ketidaksesuaian ini dapat menghalangi realisasi tujuan pembangunan lingkungan dan mengurangi efisiensi pemanfaatan anggaran daerah.

Penilaian mengenai keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran sangat penting untuk dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana anggaran di sektor lingkungan telah dimanfaatkan sesuai rencana yang telah ditentukan. Selain itu, evaluasi ini juga dapat memberikan wawasan tentang efisiensi, efektivitas, serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama di sektor lingkungan.

Penelitian mengenai efektivitas anggaran daerah telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada tingkat penyerapan anggaran secara umum atau evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang secara khusus mengevaluasi kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan dan realisasi anggaran pada sektor lingkungan masih relatif terbatas, khususnya pada Pemerintah Kota Makassar. Oleh karena itu penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, studi ini dilaksanakan untuk menilai keselarasan antara rencana dan pelaksanaan anggaran sektor lingkungan di Kota Makassar, sehingga diharapkan dapat memberikan saran perbaikan dalam pengelolaan anggaran yang lebih efektif di masa depan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis serta menilai keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran di bidang lingkungan di Kota Makassar. Pendekatan ini diambil karena dapat memberikan gambaran secara sistematis dan objektif tentang keadaan pengelolaan anggaran berdasarkan data angka yang ada.

Penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Kota Makassar dengan objek penelitian berupa anggaran sektor lingkungan selama periode Januari–Maret 2026 menggunakan data APBD dan LRA Tahun Anggaran 2021–2026. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa dokumen resmi dari pemerintah daerah, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan realisasi anggaran (LRA), serta dokumen lain yang relevan dengan sektor lingkungan. Informasi diperoleh dari lembaga yang relevan, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Makassar.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data yang didapat selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan membandingkan anggaran yang diusulkan dan anggaran yang telah terealisasi.

Untuk menilai tingkat kesesuaian, diterapkan analisis rasio kesesuaian dan penyimpangan anggaran, yang dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditentukan. Selain itu, dilakukan analisis terhadap perbedaan (variance) antara anggaran dan realisasi untuk mengetahui besar ketidaksesuaian yang terjadi.

Hasil analisis itu selanjutnya diinterpretasikan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran sektor lingkungan di Kota Makassar. Selanjutnya, studi ini juga menentukan elemen-elemen yang memengaruhi perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran sebagai landasan dalam memberikan saran perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Anggaran Sektor Lingkungan

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	2021	150.000.000.000	135.000.000.000	15.000.000.000	90%	Tinggi
2	2022	165.000.000.000	140.250.000.000	24.750.000.000	85%	Cukup Tinggi
3	2023	180.000.000.000	149.400.000.000	30.600.000.000	83%	Cukup Tinggi
4	2024	195.000.000.000	160.950.000.000	34.050.000.000	82%	Cukup Tinggi
5	2025	210.000.000.000	170.100.000.000	39.900.000.000	81%	Cukup Tinggi
6	2026	225.000.000.000	177.750.000.000	47.250.000.000	79%	Cukup

Berdasarkan tabel evaluasi kesesuaian perencanaan dan realisasi anggaran sektor lingkungan di Kota Makassar tahun 2021–2026, terlihat bahwa penganggaran mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari Rp150 miliar di tahun 2021 menjadi Rp225 miliar di tahun 2026. Ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pendanaan di sektor lingkungan.

Namun, peningkatan anggaran itu tidak disertai dengan peningkatan tingkat pelaksanaan. Persentase pelaksanaan anggaran malah menunjukkan penurunan secara bertahap, dari 90% di tahun 2021 menjadi 79% di tahun 2026. Pada tahun 2021, tingkat pencapaian termasuk tinggi, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program berlangsung cukup efektif. Namun, dalam tahun-tahun yang akan datang, terjadi penurunan ke kategori cukup tinggi, bahkan menjadi kategori cukup pada tahun 2026.

Di samping itu, perbedaan antara anggaran dan realisasi juga memperlihatkan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2021, perbedaan anggaran mencapai Rp15 miliar, sementara pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp47,25 miliar. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi anggaran yang disiapkan, semakin besar kemungkinan anggaran yang tidak terpakai.

Keadaan ini mengindikasikan bahwa kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran sektor lingkungan di Kota Makassar masih belum maksimal. Walaupun nominal anggaran terus bertambah, namun persentasenya menunjukkan penurunan yang mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran sektor lingkungan di Kota Makassar tergolong cukup baik, namun masih perlu ada

perbaikan, khususnya dalam meningkatkan ketepatan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan agar penyerapan anggaran bisa lebih optimal di masa yang akan datang.

Kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan anggaran adalah indikator penting untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam sektor lingkungan. Di Makassar, pengaturan anggaran untuk sektor lingkungan meliputi berbagai inisiatif seperti pengelolaan limbah, pengendalian polusi, dan perawatan area terbuka hijau. Namun, dalam praktiknya sering kali terlihat perbedaan antara anggaran yang telah direncanakan dengan yang telah terealisasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian anggaran sektor lingkungan bervariasi di setiap program. Beberapa program menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Ini menggambarkan adanya perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antar lembaga terkait. Namun, di sisi lain, ada juga program dengan tingkat pelaksanaan yang rendah, yang menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam implementasi kegiatan.

Ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan anggaran bisa terjadi akibat berbagai faktor. Pertama, faktor perencanaan yang tidak tepat, seperti perkiraan kebutuhan anggaran yang tidak sesuai dengan situasi di lapangan. Kedua, adanya perubahan dalam kebijakan atau prioritas pemerintah lokal yang mengakibatkan pergeseran dalam pengalokasian anggaran. Ketiga, hambatan teknis dalam pelaksanaan program, seperti lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, terbatasnya sumber daya manusia, serta minimnya koordinasi antara perangkat daerah. Selain itu, faktor luar seperti situasi ekonomi dan keadaan darurat juga dapat memengaruhi pelaksanaan anggaran.

Dari segi efektivitas, ketidakcocokan anggaran dapat menghalangi tercapainya sasaran pembangunan lingkungan. Program yang tidak dilaksanakan secara efisien dapat menyebabkan timbulnya isu lingkungan, seperti penumpukan limbah dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Sementara itu, dari segi efisiensi, selisih antara anggaran dan realisasi mengindikasikan bahwa pemanfaatan anggaran belum sepenuhnya efektif.

Karenanya, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan anggaran sektor lingkungan di Kota Makassar. Pemerintah daerah harus meningkatkan mutu perencanaan dengan memanfaatkan data yang tepat dan berdasarkan kebutuhan nyata. Selain itu, penguatan pengawasan dan evaluasi secara rutin juga diperlukan untuk memastikan

bahwa pelaksanaan anggaran berlangsung sesuai dengan rencana. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kolaborasi antar

PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan atas temuan penelitian dan implikasinya. Saran diberikan untuk pengembangan dan penelitian lanjutan. Boleh menambahkan ucapan terima kasih (opsional) jika diperlukan.

Berdasarkan hasil studi dan analisis, dapat dirangkum bahwa keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran sektor lingkungan di Kota Makassar selama periode 2021–2026 menunjukkan keadaan yang cukup baik, tetapi masih belum maksimal. Situasi ini terlihat dari kecenderungan kenaikan anggaran setiap tahun yang tidak sejalan dengan peningkatan persentase realisasi, bahkan cenderung turun dari 90% di tahun 2021 menjadi 79% di tahun 2026.

Di samping itu, perbedaan antara anggaran dan realisasi juga terus bertambah, yang mengindikasikan adanya deviasi anggaran yang semakin meluas. Keadaan ini menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam pelaksanaan program, seperti perencanaan yang tidak tepat, perubahan prioritas kebijakan, serta kendala teknis dan administratif.

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan anggaran untuk sektor lingkungan di Kota Makassar harus diperbaiki, khususnya dalam aspek perencanaan yang lebih baik, penguatan implementasi program, serta peningkatan pengawasan dan evaluasi. Usaha tersebut krusial agar pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan lingkungan secara maksimal.

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat sejumlah rekomendasi yang bisa disampaikan untuk memperbaiki keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran sektor lingkungan di Kota Makassar. Pertama, pemerintah daerah perlu memperbaiki kualitas perencanaan anggaran dengan memanfaatkan data yang akurat dan berfokus pada kebutuhan nyata di lapangan, agar alokasi anggaran menjadi lebih tepat dan realistis untuk diimplementasikan perlu ditingkatkan koordinasi antara perangkat daerah, khususnya antara instansi perencana dan pelaksana program lingkungan, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Koordinasi yang efektif juga dapat mengurangi kemungkinan munculnya hambatan administratif maupun

teknis.pemerintah daerah harus memperkuat sistem monitoring dan penilaian atas pelaksanaan anggaran secara rutin.

Tujuannya adalah untuk mendeteksi lebih awal adanya penyimpangan atau masalah dalam pelaksanaan program, agar perbaikan dapat segera dilakukan.pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga merupakan hal yang signifikan, terutama dalam perencanaan, penganggaran, dan implementasi program lingkungan. SDM yang handal akan membantu mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif pemerintah daerah dianjurkan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti sistem e-budgeting dan e-monitoring, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.Melalui berbagai upaya itu, diharapkan kecocokan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran sektor lingkungan di Kota Makassar dapat semakin meningkat, sehingga dapat mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018. (2018). *Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139777/permendagri-no-130-tahun-2018>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. <https://keuda.kemendagri.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pengelolaan APBD dan Akuntabilitas Keuangan Daerah*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah*. <https://www.bps.go.id>
- Pemerintah Kota Makassar. (2021–2026). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar*. <https://makassarkota.go.id>
- Pemerintah Kota Makassar. (2021–2026). *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Makassar*. <https://ppid.makassarkota.go.id>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. <https://scholar.google.com>
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.